

KONSELING: ANTARA PROFESIONALISASI DAN PARAPROFESIONALISASI

Oleh : A. Supratiknya, Ph. D.

1. Aktivitas seperti yang kini kita kenal sebagai KONSELING konon sudah dikenal pada masa para nabi yang hidup pada zaman sebelum Masehi. Misalnya, nabi Yesaya menggunakan istilah *Penasehat Ajaib*, yang tugas dan kegiatannya berhubungan dengan urusan menciptakan damai sejahtera bagi orang-orang yang dilayani. Pada masa yang lebih kemudian, kegiatan memberikan nasehat-bimbingan-pendampingan kepada orang-orang muda yang sedang tumbuh yang secara garis besar meruupakan tugas pokok seorang KONSELOR dapat kita temukan pada peran para ulama, entah Kiai, pendeta, pastor, Bhiksu, dan sebagainya, terhadap para murid maupun anggota jemaat lainnya. Konseling sebagai disiplin ilmu dan profesi baru muncul pada paruh pertama abad ke-20, antara lain lewat usaha tokoh seperti Carl Rogers yang merintis pengembangan apa yang disebut *Counseling Psychology*. Namun esensinya sama, yaitu "upaya MENOLONG seorang konseli atau klien lewat pendekatan psikologis" (Van Beek, 1987). Pengertian "menolong lewat pendekatan psikologis" tersebut selanjutnya dipertegas, dalam arti lain diformalkan, menjadi, (a) menyediakan sarana-kesempatan bagi klien untuk memenuhi kebutuhannya akan rasa aman, cinta, dan harga diri, bertindak secara mantap-tegas-pasti, dan tumbuh sebagai pribadi; (b) menyediakan aneka sumber dan keterampilan agar klien semakin mandiri (Brammer & Shostrom, 1982). Sebagai disiplin ilmu dan profesi baik pengertian maupun metode dan prosedur kerja konseling kini semakin canggih. Akibatnya, untuk menjadi seorang konselor kini orang perlu menempuh pendidikan tinggi antara minimal 4 sampai 8 tahun.
2. Istilah PROFESI dan profesionalisasi konon baru muncul sekitar awal abad ke-20, bahkan sebagai wacana baru mencapai

kemampuan kira-kira setengah abad kemudian, tepatnya pada dasawarsa 70-80-an (Rice, 1997). Profesionalisasi adalah "upaya suatu okupasi atau jabatan mendapatkan KONTROL EKSKLUSIF atas suatu bidang keahlian demi memperoleh bagi para anggotanya MONOPOLI atas jenis-jenis aktivitas kerja tertentu berikut STATUS SOSIAL terhormat yang menyertainya". Setiap profesi akan menetapkan apa yang disebut YURISDIKSI PROFESIONAL, yaitu serangkaian tugas atau lahan kerja yang dicoba dikontrol atau dikuasai sebaik mungkin, dalam arti seluas dan seketat mungkin. Hegemoni atau kontrol atas wilayah pekerjaan tertentu ini biasanya akan diperjuangkan untuk dilegitimasi dengan peraturan pemerintah atau undang-undang. Untuk merealisasikan "proyek profesional"-nya itu, setiap profesi perlu mengembangkan dan menguasai bahkan memonopoli komoditas dari suatu keahlian khusus tertentu. Maka, biasanya setiap profesi memiliki suatu *body of knowledge* khusus tertentu yang menjadi basis pengetahuan (*intellectual base*) untuk melakukan praktik profesi yang bersangkutan. Basis pengetahuan ini harus diperoleh lewat suatu *training* yang merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi (*higher learning*) yang berlangsung di masyarakat. Pendidikan khusus inilah yang membedakan seorang profesional dari awam di bidang tertentu. Kontrol profesional tersebut juga mengandung pengertian otonomi, dalam arti bahwa tidak ada pihak lain yang berwenang melatih, mensupervisi, atau mengevaluasi seorang profesional, selain sesama profesional di bidangnya. Selain itu, kebanyakan profesi juga menentukan klien masing-masing, yaitu orang, kelompok orang atau lembaga yang membutuhkan layanan-layanan khusus tertentu atau yang memiliki jenis-jenis problem tertentu yang mereka klaim sebagai keahlian khusus mereka untuk menolongnya (Rice, 1997). Gejala profesionalisasi juga berlangsung di bidang konseling.

3. Sekurang-kurangnya dari sudut kepentingan klien, profesionalisasi tersebut memberikan dampak positif sebagai berikut : (a) mutu pelayanan terjaga dan selalu ditingkatkan, (b) klien terlindungi dari kemungkinan malpraktek, (c) hak-hak klien dilindungi. Namun, profesionalisasi konseling juga menelorkan konsekuensi-konsekuensi lain yang kurang menguntungkan bagi berbagai pihak, seperti : (a) jumlah konselor profesional tidak akan pernah cukup memadai

dibandingkan jumlah orang yang membutuhkan layanan konseling, antara lain karena banyak peminat bidang konseling tidak sanggup memenuhi persyaratan pendidikan selama empat sampai enam tahun; (b) layanan konseling menjadi mahal, hanya terjangkau kalangan menengah ke atas, dengan akibat lebih lanjut, (c) jenis-jenis layanan konseling yang lazim dikembangkan kurang mengakomodasikan kebutuhan masyarakat golongan bawah-miskin, (d) keberadaan konselor profesional terkonsentrasi pada daerah-daerah perkotaan dan sentra-sentra industri, tidak menjangkau masyarakat relatif miskin-kurang terdidik di pedesaan-pedalaman yang merupakan mayoritas penduduk, (e) terjadi ketegangan, persaingan, bahkan permusuhan antara profesi-profesi yang sama-sama mengklaim memiliki keahlian di bidang layanan konseling. Selain itu, di satu pihak agaknya masyarakat telah kebablasan dalam memformalkan fungsi menolong yang merupakan esensi tugas seorang konselor. Memberikan dan menerima pertolongan yang pada zaman para nabi dan dalam konteks ulama-umat merupakan peristiwa atau aktivitas normal-spontan manusiawi, ini diritualisasikan dalam praktik spesialisasi yang canggih-rumit sekaligus artifisial dan tidak cuma-cuma (cf. Brammer & Shostrom, 1982). Di pihak lain, bercermine dari berbagai krisis dan bencana sosial yang melanda berbagai masyarakat di berbagai daerah di tanah air, agaknya kita semua membutuhkan apa yang disebut revolusi (Hobbs, 1964) atau transformasi (Leonard, 1973, dalam Brammer, 1979) di bidang kesehatan mental, yaitu upaya preventif dan ekstensif menolong warga masyarakat meningkatkan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan pada tingkatan yang semakin tinggi, khususnya lewat penguasaan berbagai keterampilan hidup bersama, komunikasi antar pribadi, dan pertumbuhan pribadi. Pendek kata, kiranya mulai dibutuhkan paraprofessionalisasi di bidang konseling.

4. Paraprofessional di bidang konseling adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan-pelatihan kurang dari yang dipersyaratkan untuk menjadi konselor profesional, namun bertugas memberikan layanan-layanan konseling di bawah

supervisi konselor yang berwenang (Shertzer & Stone, 1981). Konselor paraprofessional ini biasanya direkrut dari antara anggota kelompok sasaran layanan konseling. Tergantung dari kelompok sasaran yang dilayani, konselor paraprofessional ini kadang-kadang *indigenous nonprofessionals*, khususnya kalau kelompok sasaran yang dilayani adalah kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok pengungsi korban kerusuhan-pertikaian. Jenis paraprofessional lain di bidang konseling yang cukup penting adalah KONSELOR SEBAYA. Tenaga ini biasanya dipakai untuk melayani kelompok sasaran kaum muda, baik kaum muda wajar-normal di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi maupun kelompok-kelompok kaum muda dengan problem-problem khusus tertentu, seperti anak jalanan, pengguna narkoba, dan sebagainya. Kehadiran konselor paraprofessional semacam ini selain bermanfaat mengatasi sejumlah dampak negatif profesionalisasi bidang konseling seperti telah disinggung di atas, juga memberikan sejumlah manfaat tambahan lain, khususnya menjadi sejenis jembatan antara klien dengan para konselor profesional. Bukan rahasia lagi, khususnya kaum muda lebih suka dan mudah mengungkapkan persoalannya kepada seorang teman atau konselor sebaya daripada kepada seorang konselor profesional yang minimal empat sampai enam tahun lebih tua. Paraprofessionalisasi semacam ini tentu bisa juga menimbulkan eksese-eksese, jika pelaksanaannya tidak dipersiapkan dan diorganisasikan dengan baik serta dibiarkan berjalan tanpa supervisi yang benar dari pihak-pihak yang berwenang.

5. Di Indonesia, layanan konseling secara diam-diam menjadi medan persaingan antara sedikitnya dua profesi, yaitu psikolog (HIMPPI) dan petugas bimbingan (IPBI). Sampai saat ini, setidaknya HIMPPI masih terus berbenah diri, kita tidak tahu persaingan itu akan semakin terbuka-tajam atau diubah menjadi sinergi manakala masing-masing organisasi profesi tersebut menjadi semakin rapi dan solid kelak. Sementara itu, kiranya paraprofessionalisasi layanan konseling juga berjalan di luar kendali formal kedua organisasi profesi tersebut. Paraprofessionalisasi ini dipelopori oleh *volunteer* atau relawan baik yang berasal dari lingkungan psikologi dan bimbingan dan konseling maupun kalangan lain, yang melakukan advokasi dan pendampingan pada berbagai kelompok marjinal dalam wadah baik lembaga

pemerintah, semi pemerintah maupun murni swadaya masyarakat. Melihat besarnya jumlah penduduk dan kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita di satu pihak, serta kerelaan dan keluwesan lembaga-lembaga penggerak paraprofesional tersebut dalam merespon kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok masyarakat marjinal baik di lingkungan perkotaan maupun pelosok, maka kehadiran paraprofesionalisasi di bidang konseling tersebut perlu disambut baik. Kehadiran mereka dapat ditempatkan sebagai bagian dari apa yang disebut *psychological education* (Ivey & Winstein, 1970; Mosher & Ssprinthall, 1971; dalam Brammer, 1979), yaitu upaya untuk menjadikan keterampilan dan pengetahuan para konselor spesialis dikenal dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, fungsi mereka pun sebaiknya diperluas, bukan hanya sebagai *support personal* atau *counselor aides* dengan tanggung jawab yang cenderung administratif, melainkan disiapkan untuk menjadi konselor dan *trainers* dengan pendekatan individual dan kelompok di bidang *life skills* (Nelson-Johns, 1982) meliputi keterampilan mendengarkan (*emphatic understanding*), mengungkapkan diri, resolusi konflik, *problem solving* dan *planning, decision making*, pengelolaan kecemasan, *coping* terhadap aneka *stressor*, dan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, dan sebagainya. Pada kelompok-kelompok sasaran yang mereka layani, para konselor paraprofesional inipun perlu mempersiapkan *indigenous trainers* dari kalangan warga setempat, sehingga kehadiran mereka memiliki *multiplier effect* ke arah terbentuknya pribadi dan masyarakat yang makin sehat-efektif-sejahtera. Organisasi profesi seperti HIMPSI dan IPBI justru perlu mendukung gerakan ini dengan menyelenggarakan program-program *training for trainers* dalam berbagai keterampilan bagi calon paraprofesional serta bekerja sama dengan pihak penyelenggara advokasi atau pendampingan untuk mengkoordinasikan supervisi dan *evaluasi performance* para petugas di lapangan. Dengan cara itu, kita berharap memberikan kontribusi dalam upaya bersama mengentaskan masyarakat kita dari krisis menuju kehidupan baru yang makin bermutu, damai, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Brammer, L. M. (1979). *The helping relationships. Process and skills*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall
- Brammer, L. M. & Shostrom, E. L. (1982). *Therapeutic Psychology. Fundamentals of Counseling and Psychotherapy*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall
- Nelson-Jones, R. (1982). *The theory and Practice of Counseling Psychology*. London: Holt, Rinehart & Winston
- Shertzer, B. & Stone, S. C. (1981). *Fundamentals of Guidance*. Boston: Houghton Mifflin
- Rice, C. E. (1997). *The scientist-practitioner Split and The Future of Psychology*. *American-Psychologist*, 52, 1173-1181
- Van Beek, A. M. (1987). *Konseling Pastoral. Sebuah buku pegangan bagi para penolong di Indonesia*. Semarang : Satya Wacana.

Disampaikan dalam seminar akademik 2001 Himpunan Mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (HIMA PPB) Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 3 maret 2001, di Yogyakarta